



Sinergi Pembinaan Dan Pengawasan: Kunci Keberhasilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Konteks Reformasi Birokrasi Evaluasi Kinerja Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

¹Faqih Ragi, ²Andhika Rendra Nugraha, ³Adinda Putri Maharani, ⁴Nurlistiadewi
K.Affandi, ⁵Ivan Darmawan
¹⁻⁵ Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: faqih22002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Bureaucratic reform is a crucial agenda in improving the performance of regional government. This research aims to analyze the synergy of coaching and supervision as the key to the success of the Purwakarta Regency government in the context of bureaucratic reform, with a focus on performance evaluation by the Regional Inspectorate. The research method uses a descriptive qualitative approach, including literature study and analysis of the Purwakarta Regency Regional Inspectorate Bureaucratic Reform Road Map document. Data were analyzed using thematic analysis techniques, focusing on eight areas of change in bureaucratic reform. The research results show that the Regional Inspectorate has implemented innovative programs within the reform framework, but faces challenges such as resistance to change and limited resources. The synergy between the coaching and supervision functions has been proven to contribute positively to improving governance and public services. In conclusion, the continuity of implementation of the road map and the role of the Inspectorate as a catalyst for change are very important for the success of reform. This research contributes to understanding the dynamics of bureaucratic reform at the district level and highlights the importance of strengthening the capacity of Regional Inspectorates in driving systemic change.*

Keywords: *bureaucratic reform, coaching, supervision, performance evaluation, Regional Inspectorate, Purwakarta Regency.*

Abstrak. Reformasi birokrasi merupakan agenda krusial dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi pembinaan dan pengawasan sebagai kunci keberhasilan pemerintahan Kabupaten Purwakarta dalam konteks reformasi birokrasi, dengan fokus pada evaluasi kinerja oleh Inspektorat Daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, meliputi studi literatur dan analisis dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, berfokus pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah telah mengimplementasikan program inovatif dalam kerangka reformasi, namun menghadapi tantangan seperti resistensi perubahan dan keterbatasan sumber daya. Sinergi antara fungsi pembinaan dan pengawasan terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola dan pelayanan publik. Kesimpulannya, kontinuitas implementasi road map dan peran Inspektorat sebagai katalisator perubahan sangat penting bagi keberhasilan reformasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika reformasi birokrasi di tingkat kabupaten dan menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Inspektorat Daerah dalam mendorong perubahan sistemik.

Kata kunci: reformasi birokrasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi kinerja, Inspektorat Daerah, Kabupaten Purwakarta.

LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan agenda krusial dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia, dengan implementasi yang semakin intensif di tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Purwakarta, sebagai daerah otonom, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta memainkan peran vital sebagai ujung tombak dalam aspek pengawasan dan pembinaan, menjadi katalisator perubahan dalam struktur birokrasi lokal.

Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta menjadi dokumen strategis yang berfungsi sebagai panduan komprehensif dalam mengarahkan proses transformasi birokrasi di daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan lokal, tetapi juga diselaraskan dengan standar internasional, khususnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang di advokasi oleh United Nations Development Programme (UNDP). Prinsip-prinsip ini mencakup partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam ranah pengawasan, Kabupaten Purwakarta mengadopsi dua pendekatan utama yaitu: Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Melekat. Pengawasan fungsional, yang diimplementasikan oleh Inspektorat Daerah, meliputi serangkaian aktivitas audit, *review*, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja organisasi pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja beroperasi sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Sementara itu, pengawasan melekat merupakan mekanisme kontrol internal yang menjadi tanggung jawab setiap pimpinan terhadap bawahan dan unit kerjanya, menciptakan sistem *checks and balances* dalam struktur organisasi.

Meskipun demikian, implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Purwakarta menghadapi berbagai tantangan signifikan. Resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan, terutama di kalangan pegawai yang telah lama bekerja dalam sistem lama. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas SDM, juga menjadi kendala dalam mewujudkan visi reformasi secara optimal. Selain itu, kompleksitas koordinasi antar instansi sering kali menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan program reformasi. Di tengah tantangan tersebut, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang bersih terus meningkat. Hal ini menciptakan urgensi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mengoptimalkan sinergi antara fungsi pembinaan dan pengawasan. Evaluasi kinerja yang dilakukan Inspektorat kini tidak hanya

berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik.

Upaya integrasi prinsip-prinsip *good governance* United Nations Development Programme (UNDP) ke dalam praktik pengawasan dan pembinaan di Kabupaten Purwakarta juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun ada komitmen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan mekanisme dan pemahaman masyarakat. Transparansi dalam pelaporan hasil audit dan evaluasi juga masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi publik akan keterbukaan informasi. Efektivitas pengawasan fungsional dan pengawasan melekat dalam konteks reformasi birokrasi lokal juga menjadi sorotan. Meskipun kedua pendekatan ini telah diterapkan, masih terdapat celah dalam hal konsistensi implementasi dan tindak lanjut temuan. Hal ini berpotensi menghambat upaya pengurangan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi salah satu tujuan utama reformasi birokrasi. Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam pengawasan dan pembinaan. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dituntut untuk mengadopsi dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pengawasan, namun hal ini juga memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur yang memadai.

Dinamika politik lokal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap proses reformasi birokrasi. Perubahan kepemimpinan dan prioritas politik dapat mempengaruhi konsistensi dan keberlanjutan program-program reformasi yang telah diinisiasi. Hal ini menuntut adanya mekanisme institusionalisasi reformasi yang kuat agar dapat bertahan melampaui siklus politik. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Purwakarta memiliki potensi untuk menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan dalam hal adaptasi praktik terbaik sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal masing-masing daerah. Kompleksitas tantangan dan peluang dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Purwakarta, khususnya terkait peran Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan, memerlukan kajian mendalam dan komprehensif. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai motor penggerak reformasi birokrasi di tingkat lokal.

KAJIAN TEORITIS

Teori Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep multidimensi yang telah berkembang sejak era Weber. Pollitt dan Bouckaert (2017) mendefinisikan reformasi birokrasi sebagai perubahan

terencana terhadap struktur dan proses organisasi sektor publik dengan tujuan meningkatkan kinerja. Teori *New Public Management* (NPM) yang dikemukakan oleh Hood (1991) menekankan pentingnya adopsi praktik manajemen sektor swasta dalam birokrasi publik. Sementara itu, Denhardt dan Denhardt (2000) mengajukan konsep *New Public Service* (NPS) yang lebih berfokus pada pelayanan warga negara dan penguatan demokrasi.

Dinamika Reformasi Birokrasi di Tingkat Daerah

Reformasi birokrasi di tingkat daerah merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi berbagai faktor institusional, sosial, dan politik. Prasojo & Kurniawan (2008) mengidentifikasi bahwa implementasi reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang berakar pada warisan sistem birokrasi kolonial dan rezim otoriter. Hal ini menciptakan resistensi terhadap perubahan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik.

Dwiyanto (2015) lebih lanjut menganalisis bahwa resistensi ini sering kali dimanifestasikan dalam bentuk formalisme reformasi, di mana perubahan hanya terjadi di permukaan tanpa mengubah nilai dan praktik fundamental birokrasi. Fenomena ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat daerah, yang menurut Thoha (2014), menciptakan kesenjangan antara aspirasi reformasi dan kemampuan implementasi.

Dalam konteks ini, peran Inspektorat Daerah menjadi sangat krusial. Subekti & Gustomy (2018) berargumen bahwa Inspektorat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai katalisator perubahan dalam struktur birokrasi lokal. Namun, Nurdin (2017) mengidentifikasi dilema inherent dalam peran ganda Inspektorat sebagai pengawas dan pembina, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan.

Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Konteks Reformasi

Integrasi fungsi pembinaan dan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi merupakan pendekatan yang kompleks dan multidimensi. Sofyani & Akbar (2013) mengembangkan model teoretis yang menunjukkan bahwa sinergi antara pembinaan dan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi melalui mekanisme pembelajaran organisasi dan penguatan akuntabilitas internal.

Namun, Astuti & Adrison (2019) memperingatkan bahwa implementasi model ini memerlukan keseimbangan yang cermat untuk menghindari dilusi fungsi pengawasan. Mereka mengusulkan pendekatan "pengawasan konstruktif" yang memadukan elemen pembinaan dalam proses pengawasan tanpa mengorbankan objektivitas dan independensi.

Evaluasi Kinerja sebagai Instrumen Reformasi

Evaluasi kinerja dalam konteks reformasi birokrasi telah berevolusi dari sekadar alat kontrol menjadi instrumen strategis untuk mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nugroho (2016) mengembangkan kerangka evaluasi kinerja adaptif yang responsif terhadap dinamika lokal dan mampu mengakomodasi variasi kontekstual antar daerah.

Sancoko (2010) lebih lanjut mengidentifikasi bahwa efektivitas evaluasi kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas data, kapasitas analitis pelaksana evaluasi, dan mekanisme tindak lanjut yang sistematis. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah untuk memastikan dampak yang berkelanjutan.

Tantangan Implementasi Good Governance dan Peran Teknologi

Konsep *governance*, sebagaimana dijelaskan oleh Rhodes (1996), merujuk pada pola baru dalam pengelolaan pemerintahan yang melibatkan interaksi kompleks antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. UNDP (1997) mengembangkan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, konsensus orientasi, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Fukuyama (2013) menekankan pentingnya kapasitas negara dalam implementasi *good governance*.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat lokal menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi. Pratikno (2012) menganalisis bahwa implementasi partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas sering terhambat oleh faktor struktural dan kultural yang berakar pada sejarah panjang sentralisasi kekuasaan di Indonesia.

Dalam konteks ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan potensi transformatif sekaligus menciptakan tantangan baru. Indrajit (2016) mengembangkan model *e-governance* yang adaptif terhadap konteks lokal, namun Wahyudi & Sopanah (2020) memperingatkan bahwa adopsi TIK tanpa disertai perubahan kultur organisasi dan peningkatan kapasitas SDM dapat menghasilkan "*isomorphic mimicry*" di mana perubahan hanya bersifat superfisial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif berguna untuk menghasilkan analisis mendalam tentang tulisan, ucapan, dan perilaku yang dapat diamati dari individu dalam kelompok masyarakat dan organisasi tertentu dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang lengkap, menyeluruh, dan komprehensif. Penelitian kualitatif mengumpulkan dan menganalisis data secara non-kuantitatif untuk menyelidiki hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respons (Saraclaers, 1993:6).

Adapun metode pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi literatur (*review literatur*). Model *review narrative* digunakan untuk membandingkan data dari beberapa jurnal atau sumber data dan dirangkum berdasarkan teori dan model yang ada. Selain itu dalam proses analisis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Tipe penelitian deskriptif analitik untuk keperluan penelitian ini dilakukan karena langkah utama dari penelitian, yaitu memberikan deskripsi tentang subjek penelitian, akan mempermudah langkah selanjutnya, yaitu melakukan analisis mendalam dan menyeluruh dari subjek. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya untuk memberikan gambaran tentang variabel, gejala, atau keadaan yang ada di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mendalam terhadap peran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mengungkapkan evolusi signifikan dari fungsi tradisional sebagai "*watchdog*" menjadi mitra strategis dalam akselerasi reformasi birokrasi. Transformasi ini tercermin dalam pendekatan holistik yang mengintegrasikan fungsi pengawasan dan pembinaan, menciptakan sinergi yang menjadi katalis utama perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Inovasi dalam metodologi pengawasan, seperti implementasi audit berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit, telah meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Paralel dengan ini, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan Inspektorat telah memperkuat fondasi *good governance*, meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur dalam manajemen risiko dan optimalisasi tata kelola organisasi.

Evaluasi kinerja mengungkapkan bahwa sinergi antara pembinaan dan pengawasan telah menjadi faktor kunci dalam akselerasi reformasi birokrasi di Kabupaten Purwakarta. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja dan penciptaan nilai tambah bagi organisasi pemerintah daerah. Implementasi program inovatif seperti "Inspektorat Sahabat SKPD" menandai pergeseran paradigma dari pengawasan punitif menjadi kolaboratif dan edukatif, menghasilkan peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perbaikan sistem pengendalian internal di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Meskipun demikian, implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Purwakarta masih menghadapi tantangan multidimensi. Ketiadaan sistem manajemen perubahan yang terencana dengan baik, tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja, serta sistem manajemen kepegawaian yang belum optimal, termasuk kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) yang belum memadai, menjadi hambatan

signifikan. Dalam menghadapi tantangan ini, Inspektorat telah mengembangkan strategi mitigasi yang komprehensif, meliputi pengembangan budaya organisasi berorientasi kinerja dan integritas, fasilitasi penerapan manajemen risiko di seluruh SKPD, dan penguatan mekanisme pengawasan internal yang preventif dan edukatif.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terintegrasi (SIMWAS-T) oleh Inspektorat merupakan terobosan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pengawasan. Sistem ini memfasilitasi perencanaan audit berbasis risiko, pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih akurat dan tepat waktu. Inovasi ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

Evaluasi komprehensif menunjukkan dampak positif dari sinergi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta. Peningkatan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perbaikan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dan peningkatan skor pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi indikator keberhasilan pendekatan ini. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, menegaskan pentingnya penguatan peran Inspektorat sebagai katalisator reformasi birokrasi dan fasilitator transformasi tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan implementasi sinergi pembinaan dan pengawasan tidak terlepas dari kolaborasi efektif dengan berbagai instansi terkait. Kerjasama dengan Bappeda dalam penyelarasan program pengawasan dengan perencanaan pembangunan daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengembangan metodologi audit, serta Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi, mencerminkan pendekatan *whole-of-government* dalam reformasi birokrasi. Model kolaborasi ini menawarkan pembelajaran berharga bagi daerah lain dalam mengoptimalkan sumber daya dan *expertise* lintas sektor untuk mendukung agenda reformasi.

Berdasarkan analisis komprehensif, beberapa rekomendasi strategis diajukan untuk optimalisasi lebih lanjut. Pertama, penguatan strategi manajemen perubahan untuk mengatasi resistensi dan membangun komitmen aparatur terhadap agenda reformasi. Kedua, peningkatan investasi dalam pengembangan kapasitas SDM APIP dan infrastruktur teknologi untuk mendukung inovasi dalam pengawasan dan pembinaan. Ketiga, intensifikasi kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan sumber daya dan *expertise* dalam mendukung reformasi birokrasi. Keempat, pengembangan mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan relevansi program reformasi dalam jangka panjang.

Sinergi antara pembinaan dan pengawasan yang diimplementasikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah terbukti menjadi model efektif dalam mengakselerasi reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan daerah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Keberhasilan ini menawarkan blueprint yang dapat diadaptasi oleh daerah lain, dengan penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan lokal masing-masing. Kedepan, penguatan peran Inspektorat sebagai katalisator perubahan dan fasilitator *good governance* akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Purwakarta, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah telah menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya peran Inspektorat Daerah sebagai katalisator perubahan dalam struktur birokrasi, sebagaimana digarisbawahi dalam latar belakang penelitian.

Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta, yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip *good governance* UNDP, telah menghasilkan dampak positif yang terukur. Hal ini tercermin dari peningkatan opini audit BPK, perbaikan indeks kepuasan masyarakat, dan peningkatan skor AKIP. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat, sesuai dengan strategi yang diuraikan dalam latar belakang.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan berbagai tantangan signifikan yang masih dihadapi, termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas koordinasi antar instansi. Tantangan-tantangan ini, yang telah diidentifikasi sejak awal dalam latar belakang penelitian, memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif dalam implementasi reformasi birokrasi.

Lebih lanjut, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan Kabupaten Purwakarta dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* ke dalam praktik pengawasan dan pembinaan menawarkan model potensial yang dapat diadaptasi oleh daerah lain. Namun, proses adaptasi ini harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan lokal masing-masing daerah, sesuai dengan kompleksitas yang diuraikan dalam latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. D., & Adrison, V. (2019). Integrating oversight and capacity building: Towards a model of constructive supervision in local government reform. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(3), 159-178.
- Dwiyanto, A. (2015). Reformasi birokrasi kontekstual: Kembali ke jalur yang benar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, R. E. (2016). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. (2016). Reformasi teori kebijakan dan administrasi publik. Jakarta: Kencana.
- Nuridin, I. (2017). Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi birokrasi dan good governance: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 32(3), 195-217.
- Pratikno. (2012). Manajemen jaringan dalam perspektif strukturasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 1-17.
- Sancoko, B. (2010). Pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 17(1), 43-51.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184-205.
- Subekti, R. A., & Gustomy, R. (2018). Menakar kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 120-135.
- Thoha, M. (2014). Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, A., & Sopanah, A. (2020). The impact of e-government implementation on local government performance: A case study in East Java, Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(6/7), 651-667.
- Suwanda, Dadang. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. PPM-Manajemen: Jakarta, 2013.
- Besse Herlina, Z. . (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education* (2022). *Implementasikan SPIP, Upaya Pemkab Purwakarta Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan Bersih* . bandung: portal jabar prov go.id.
- JB. SUMARLIN: *Good Governance Mensyaratkan Pengawasan Internal dan Eksternal*. bpkp go.id.

